

**EVALUASI STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KOTA METRO
(STUDI KASUS DI KECAMATAN METRO UTARA)**

Diko Algasi

Email: dikoalgasi@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro

Abstract

Poverty is a nation's problem that is urgent and requires handling steps and a systematic, integrated and comprehensive approach involving all components of society. Poverty must be alleviated in various ways and strategies so that people's lives will become more prosperous.

From the analysis, it can be concluded that the poverty reduction strategies implemented by the Metro City Regional Government are long-term, targeted, poverty reduction and social welfare development strategies, and focus on the education, health, micro and macro economic policies. Reducing the expenditure burden of the poor through social assistance and improving basic services, increasing the ability and opinions of the poor. Conduct a review to identify policy areas that impede the economic sector of the poor and encourage socio-economic institutions by providing incentives to serve the interests of the poor more effectively.

Keywords: *strategy, poverty*

I. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kemiskinan dipicu oleh berbagai faktor seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dan lingkungan yang mengakibatkan minimnya akses terhadap barang dan jasa. (Sugandi, 2017: 3).

Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Nasional, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 13,33 % pada tahun 2010 menjadi 10,64 % pada tahun 2017 (BPS, angka Maret) Namun

demikian penanggulangan kemiskinan secara umum dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama jurun waktu 2010-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,44 %.

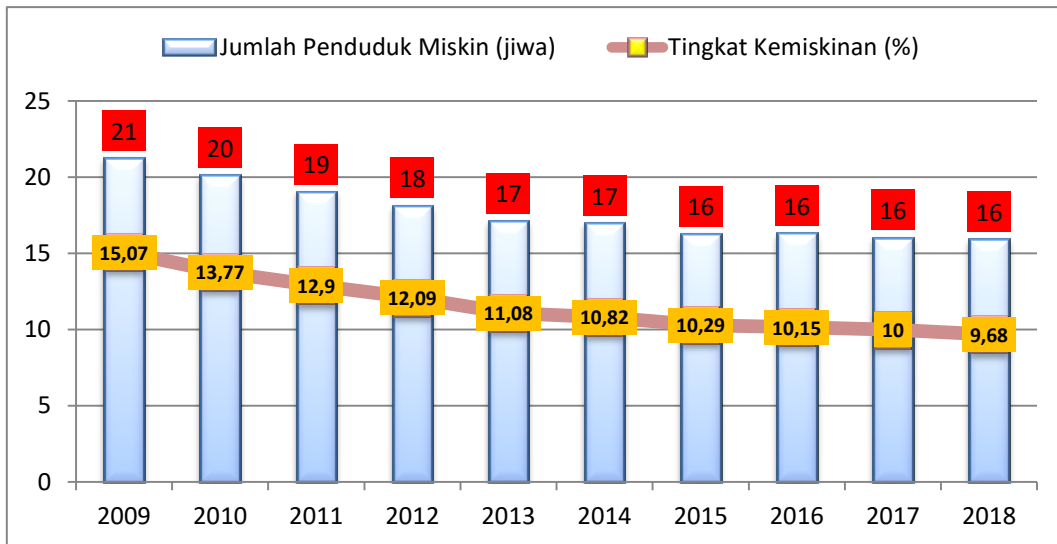
Adapun landasan hukum dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), kemudian berlanjut ke Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 pada tatanan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah adalah pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dilegitimasi dengan Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan

Kabupaten/Kota, kemudian didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Dan Kabupaten/Kota, dan Keputusan Walikota Metro Nomor : 127/Kpts/B-2/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro Tahun 2017 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Metro mempunyai tugas yaitu melakukan koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Metro serta mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Metro.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, tingkat kemiskinan pada akhir periode RPJMD Kota Metro 2016-2021 ditargetkan turun menjadi 7,82 % dari

angka semula 10,29 % di awal periode RPJMD. Berdasarkan data atas BPS, pada tahun 2017, tingkat kemiskinan Kota Metro sudah mencapai angka satu digit yaitu 9,89 %. Dalam rangka pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2010 telah diterbitkan kebijakan operasional berupa Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Tujuan peraturan ini adalah meningkatkan efektifitas upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan. Di tingkat pusat, efektifitas tersebut berjalan melalui penguatan kapasitas pemerintah dan peran masyarakat oleh Tim Nasional Percepatan Penangulangan Kemiskinan (TNP2K).

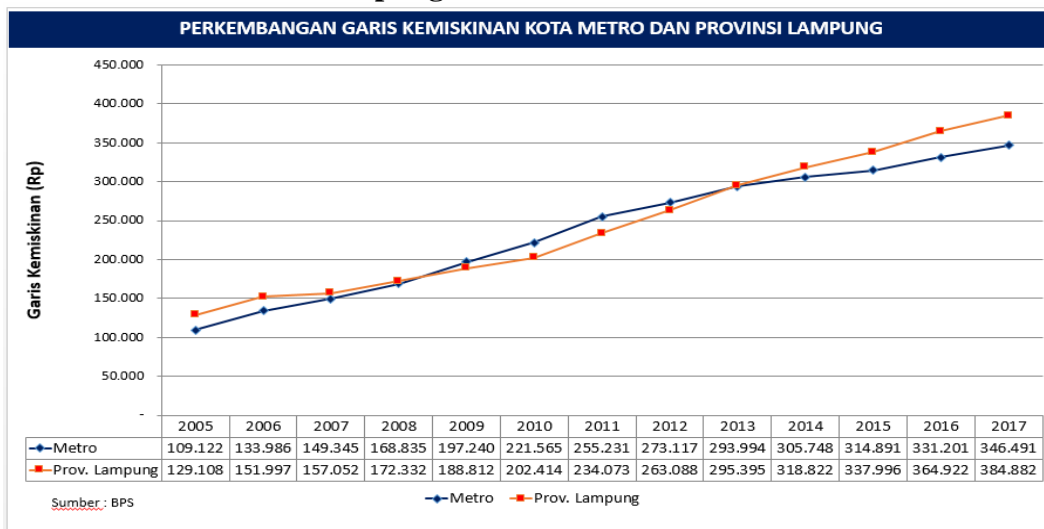
Grafik 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Metro Tahun 2009-2018



Sumber. Kecamatan Metro Utara, 2019.

Berdasarkan grafik 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah tingkat kemiskinan di Kota Metro dari kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2009-2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Artinya pemerintah Kota Metro telah berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Metro, yang berarti terjadi penurunan sebesar 5,39%.

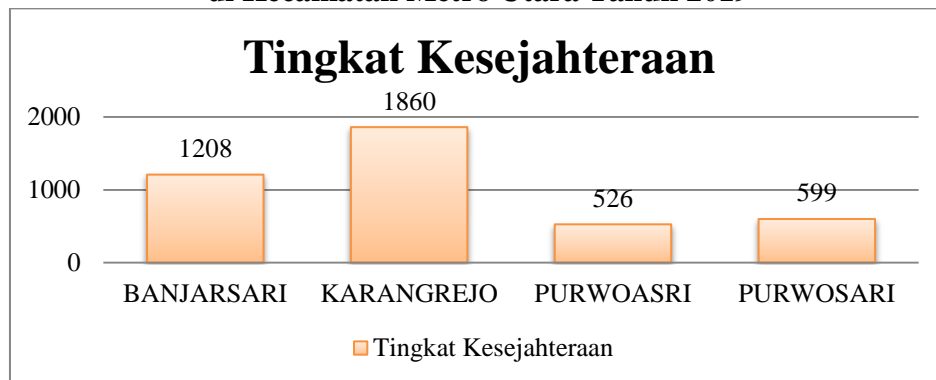
Grafik 2. Perkembangan Garis Kemiskinan di Kota Metro dan Provinsi Lampung dari Tahun 2005-2017



Sumber: BPS Kota Metro, 2019.

Berdasarkan grafik 2 dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan di kota metro dan provinsi lampung selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2005 sampai dengan 2017. Garis kemiskinan tertinggi terletak pada angka 370.000.

Grafik 3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Metro Utara Tahun 2019



Sumber. Kecamatan Metro Utara, 2019.

Berdasarkan grafik 3 dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Metro Utara memiliki 4 desa/kelurahan yang masing-masing memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Tingkat kesejahteraan yang paling tinggi yaitu pada desa Karangrejo dengan nilai 1860 ribu.

Implikasi Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 pada tatanan kelembagaan

penanggulangan kemiskinan di daerah adalah pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dilegitimasi dengan Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Sistem kelembagaan bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di

daerah sebagaimana di rencanakan dalam RPJMD, sekaligus memantau relevansi arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD terhadap pemenuhan target pengurangan angka kemiskinan nasional dan target SDGs. Dalam hal ini Dunn (1978: 45), mengemukakan beberapa Model Evaluasi Kebijakan Publik yang terdiri dari: *The adversary model*, *the transaction model* dan *good free model*. Ketiga model tersebut memiliki fungsi yaitu untuk mengevaluasi beberapa kebijakan agar supaya efektif dan baik serta meminimalisir dampak negatif dan ketidaktepat sasaran suatu kebijakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Dan Kabupaten/Kota, salah satu tugas TPPK Kabupaten kota adalah pengordinasian penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan (SPKD) Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya SPKD tersebut dijadikan dasar penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan sehingga seluruh program yang tertuang dalam SPKD juga tertuang dalam RPJMD. Dengan demikian diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan akan dapat terwujud sesuai dengan yang ditetapkan.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan memuat 4 (empat) pokok strategi yaitu (1) perbaikan program perlindungan sosial, seperti memberikan bantuan sosial (raskin/ program keluarga harapan) dan perlindungan sosial kepada masyarakat, (2) peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, b. Kesehatan, c. pekerjaan umum dan penataan ruang, d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman, e.

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan f. sosial. (3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, seperti perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas. (4) pembangunan inklusif yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi, pembangunan kesehatan dan pendidikan memerlukan strategi khas. Untuk itu percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui strategi dan program dengan cara (a) mengurangi beban, pengeluaran masyarakat miskin, (b) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (c) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, (d) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Ada 40 program-program yang sudah dilakukan oleh LP2KD Kota Metro beberapa diantaranya adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Anak, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan lain sebagainya.

Kecamatan Metro Utara adalah salah satu Kecamatan yang ada di kota Metro. Kecamatan Metro Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan

Kecamatan. Secara geografis, Kecamatan Metro Utara memiliki luas wilayah 19,64 km². Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Punggur Lampung Tengah, Sebelah Selatan: Kecamatan Metro Pusat, Sebelah Barat: Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, Sebelah Timur: Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

Secara administratif Kecamatan Metro Utara terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Banjarsari, Purwosari, Purwoasri dan Karangrejo, dengan letak pusat pemerintahan Kecamatan berada di Kelurahan Banjarsari yang berjarak \pm 3 km dari pusat Kota Metro.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 13 November 2018 maka peneliti mendapatkan beberapa informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan di Kecamatan Metro Utara yaitu masih ditemukan rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah. Selanjutnya masih ditemukan rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah, Selain itu juga terdapat rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah.

Berkaitan hal tersebut maka TKPK Kota Metro yang dilegimitasi dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/KPTS/B-2/2018 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengoordinasian penyusunan SPKD Kota Metro Tahun 2016-2021 dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Metro.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Bagaimanakah Evaluasi Strategi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro (Studi Kasus Di Kecamatan Metro Utara)?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Metro Utara sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai angka 11%-20% terendah dan rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21%-30% terendah .
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro (Studi Kasus Di Kecamatan Metro Utara).

II. Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan. Menurut Idham dan Pananrangi (2012: 33) Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Kurniawan (2017: 176) terdapat enam modal utama yang tidak dimiliki oleh masyarakat miskin. Pertama, modal manusia yang

mencakup kesehatan, nutrisi, keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi produktif dalam ekonomi. Kedua, modal usaha yang meliputi mesin, fasilitas motor elektronik yang dipergunakan dalam bidang pertanian, industri termasuk industri jasa. Ketiga, infrastruktur seperti jalan, listrik, air, sanitasi dan sistem telekomunikasi. Keempat, modal yang berkaitan dengan alam yaitu tanah yang subur, keanekaragaman hayati, ekosistem yang berfungsi dengan baik yang dapat menyediakan pelayanan lingkungan yang dibutuhkan oleh manusia. Kelima, modal institusi publik, seperti peraturan-peraturan perdagangan komersial, sistem hukum, pelayanan dan kebijakan pemerintah yang mengatur pembagian tenaga kerja yang damai dan adil. Keenam, modal pengetahuan yang terdiri atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan produktifitas dalam menghasilkan produk serta meningkatkan modal fisik dan alam.

Menurut Habibullah (2010: 42) kemiskinan merupakan persoalan struktural, bukan individu. Karenanya persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi semata-mata dianggap tidak akan mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Evaluasi program

Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Melakukan evaluasi program ialah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan (Arikunto, 2009: 297).

III. Metodologi

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Metro Utara. Pada penelitian ini jumlah populasinya yaitu sebanyak 10 orang. Pengambilan sampel disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dikarenakan penelitian ini menggunakan program *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan bantuan Microsoft Excel 2013.

IV. Hasil Penelitian

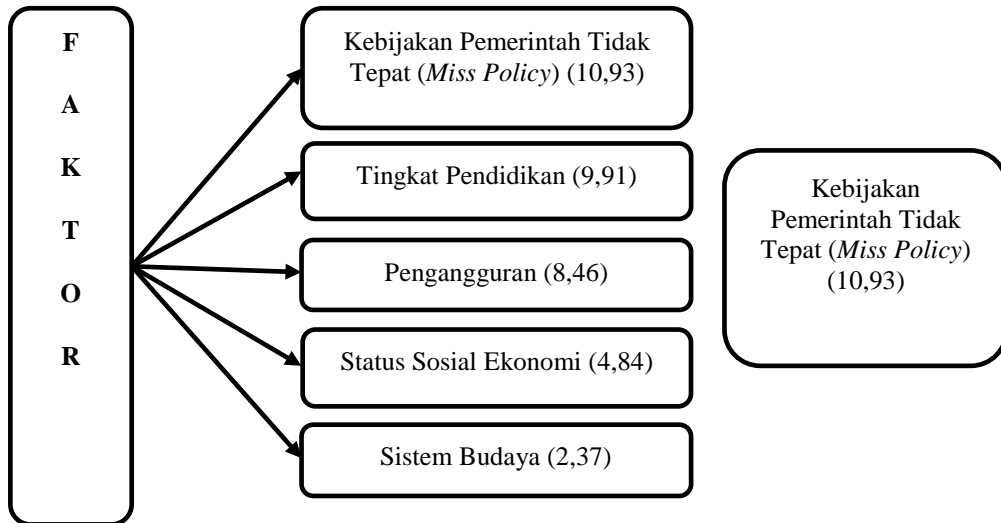
A. Uraian Hasil Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

Hasil perumusan strategi dengan menggunakan analisis matriks QSP di dapatkan alternative strategi terbaik untuk Kota Metro dalam menanggulangi kemiskinan adalah melakukan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dengan nilai TAS tertinggi yaitu (0,418). Kuesioner matriks QSP di sebar kepada masyarakat Metro Utara.

1. Pengolahan data dengan analisis AHP

Pengolahan data yang di analisis dengan AHP menghasilkan alternative strategi yang sesuai untuk Kota Metro adalah Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dengan nilai TAS tertinggi yaitu (0,418). Strategi ini dilakukan dengan fokus meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk berwirausaha. Strategi prioritas kedua yaitu Sistem Budaya dengan nilai TAS tertinggi kedua yaitu sebesar (0,3855). Strategi ini dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pengembangan dan memanfaatkan budaya lokal menjadi kreatif dan bernilai ekonomis.

Berikut merupakan gambar nilai pembobotan priority vector pada setiap



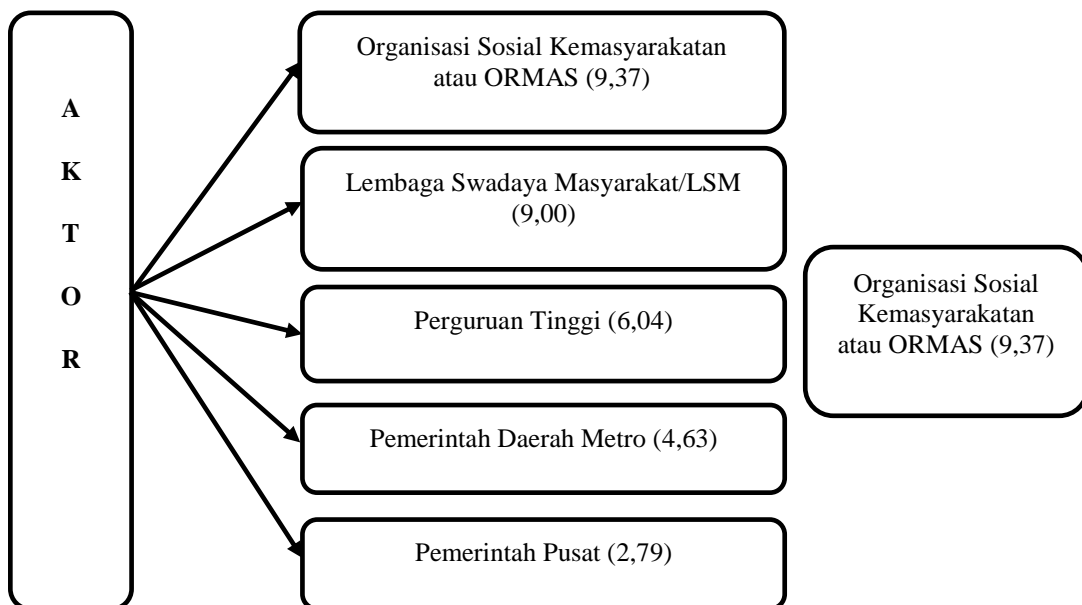
kriteria:

Gambar 1 Pembobotan Nilai Priority Vector Kriteria Faktor

Pada gambar diatas terlihat nilai *priority vector* tertinggi pada Kebijakan Pemerintah Tidak Tepat (*Miss Policy*) (10,93), dengan nilai ini berarti faktor utama yang harus diperhatikan oleh Kecamatan Metro Selatan dalam mengontrol pemerintah dalam merumuskan kebijakan, agar kebijakan

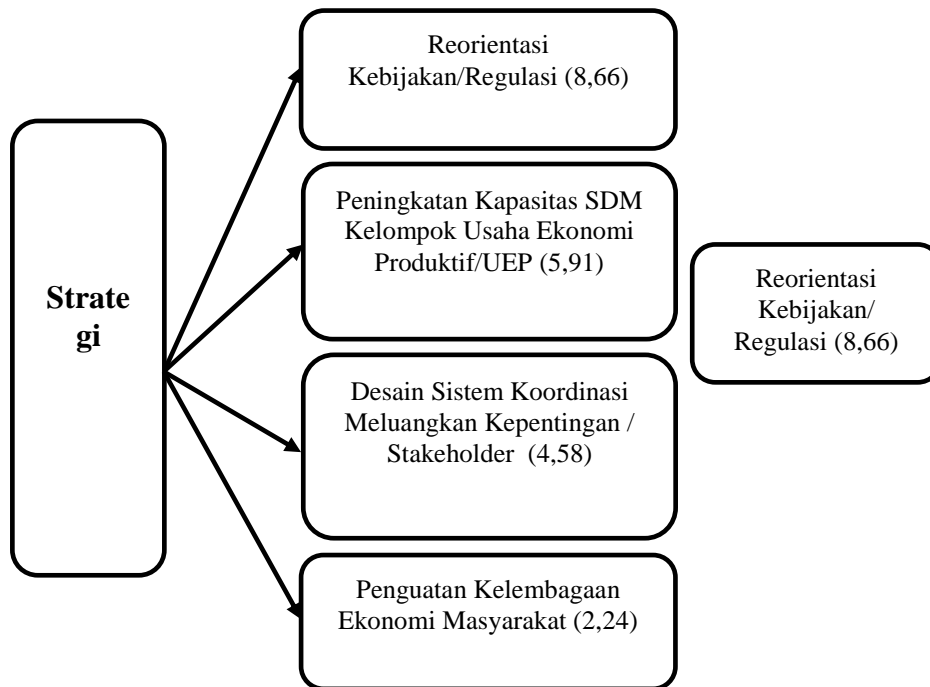
yang dirumuskan tersebut tepat sasaran dan dapat menanggulangi kemiskinan. Urutan kedua yaitu Tingkat Pendidikan (9,91), urutan ketiga Pengangguran (8,46), urutan keempat Status Ekonomi Sosial (4,84), dan urutan kelima yaitu Sistem Budaya (2, 37).

Gambar 2. Pembobotan Nilai Priority Vector Kriteria Aktor



Pada gambar di atas terlihat nilai priority vector kriteria aktor tertinggi pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan (ORMAS) dengan nilai sebesar 9,37. Dengan ini berarti aktor utama yang harus diperhatikan oleh Kota Metro adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan (ORMAS). Selanjutnya, urutan kriteri aktor kedua yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dengan nilai sebesar 9,00, dan urutan ketiga yaitu Perguruan Tinggi dengan nilai sebesar 6,04. Urutan keempat yaitu Pemerintah Daerah Metro dengan nilai sebesar 4,63 dan urutan kelima yaitu Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar 2,79.

Gambar 3. Pembobotan Nilai Priority Vector Kriteria Alternatif Strategi



Pada gambar di atas terlihat nilai priority vector kriteria alternatif strategi tertinggi yaitu Reorientasi Kebijakan/Regulasi dengan nilai tertinggi (8,66).

Strategi ini dapat diterapkan melalui:

- a. Membantu masyarakat Kota Metro untuk membentuk peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Kote Metro, terkhusus Metro Utara.
- b. Membantu masyarakat Kota Metro melalui payung hukum yang kuat dan keberpihakan pemerintah akan

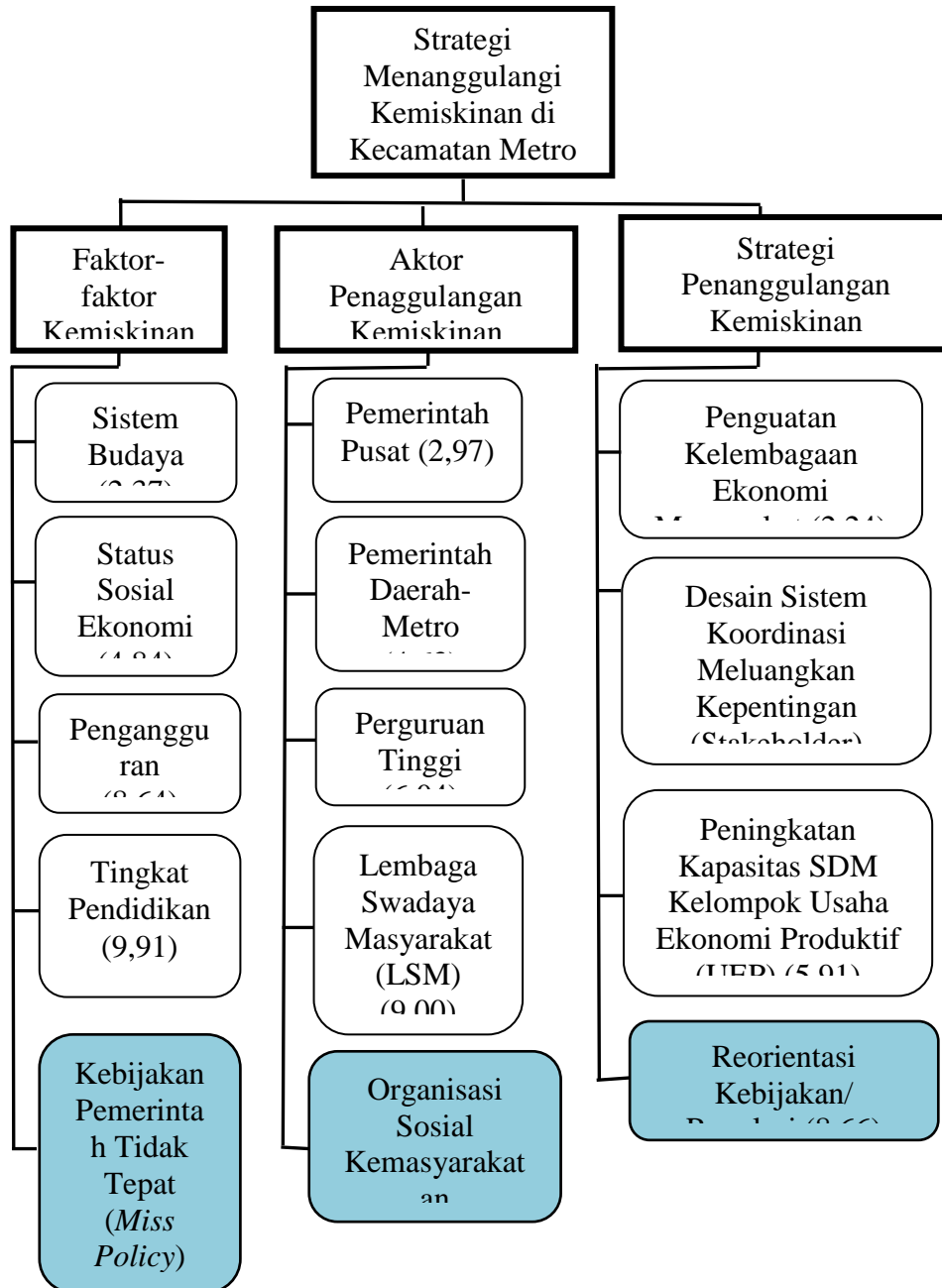
kebijakan yang mengarah kepada masyarakat kelas menengah kebawah. Peraturan yang ditetapkan tersebut harus bermanfaat kepada masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi mikro maupun makro yang tengah digelutinya.

- c. Mambantu masyarakat dalam mengendalikan perilaku bisnis dalam bidang perdagangan, seperti penstabilan harga-harga pangan, impor dan ekspor, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan lain sebagainya.

Strategi prioritas kedua yaitu Peningkatan Kapasitas SDM

Kelompok Usaha Ekonomi sebesar 4,58. Strategi pada urutan Produktif/UEP dengan nilai sebesar keempat yaitu Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dengan nilai (5,91). Strategi pada urutan ketiga yaitu Desain Sistem Koordinasi Meluangkan Kepentingan/Stakeholder dengan nilai sebesar (2,24). Strategi pada urutan kedua yaitu Reorientasi Kebijakan/

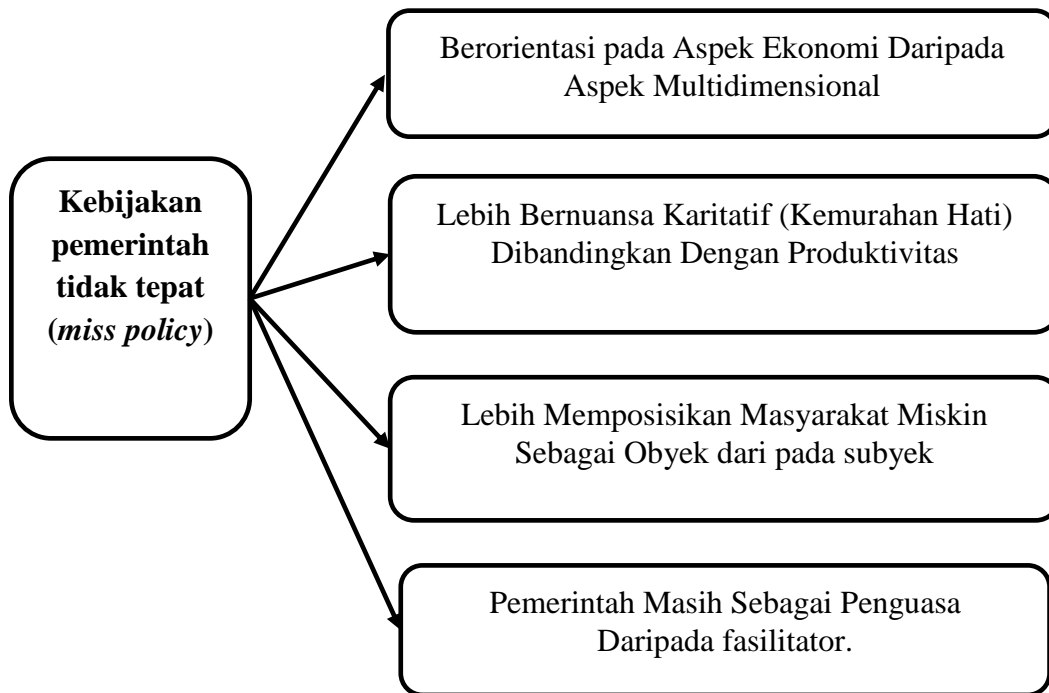
Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan dalam bentuk gambar AHP sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Hierarkhi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro

Pembahasan

1. Kebijakan pemerintah tidak tepat (*miss policy*)



Gambar 2. Skema Kebijakan pemerintah tidak tepat (*miss policy*)

Adapun kebijakan pemerintah daerah Kota Metro yang tidak tepat dalam menanggulangi kemiskinan yang peneliti temukan dilapangan yaitu :

a. Masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Fenomena kemiskinan sangat beraneka ragam, kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak

memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

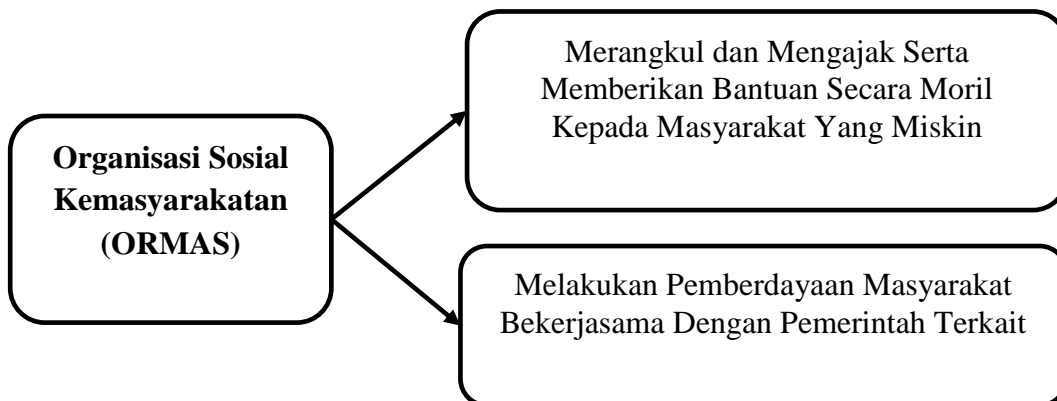
b. Lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) dibandingkan dengan produktivitas. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan atas karitatif, tidak akan mampu memunculkan dorongan dari masyarakat miskin sendiri untuk melakukan ikhtiar dan berupaya bagaimana mengatasi kemiskinan yang dihadapinya. Mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Dengan demikian, jangan berharap mereka akan menjadi produktif. Padahal program penanggulangan

- kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif.
- c. Lebih memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek dari pada subyek. Masyarakat miskin diposisikan sebagai obyek, yaitu kelompok yang dijadikan sasaran perubahan, bukan sebagai subyek yakni sebagai pelaku perubahan.
 - d. Pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Dalam penanganan kemiskinan, pemerintah masih bertindak sebagai penguasa yang kerap kali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin.

Tindakan seperti ini justru mengabaikan potensi (sekecil apapun potensi itu) yang dimiliki masyarakat miskin. Sebaliknya, pemerintah semestinya bertindak sebagai fasilitator, yang tugasnya adalah mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki.

2. Organisasi Sosial Kemasyarakatan (ORMAS)

Peran Organisasi Sosial Kemasyarakatan (ORMAS) dalam menanggulangi kemiskinan di kota metro dapat diuraikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Skema Peran Organisasi Sosial Kemasyarakatan (ORMAS)

Peran Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Metro dapat dilakukan dengan :

- a. Merangkul dan mengajak serta memberikan bantuan secara moril kepada masyarakat yang miskin. Hal ini perlu dilakukan mengingat keluarga yang miskin akan sulit berkembang jika terisolasi dari masyarakat lainnya.
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan pemerintah terkait. Dengan membentuk program kerjasama yang berbentuk kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan. Kerjasama program

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dikenal dengan nama Aliansi Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan nama Program SAPA (*Strategic Alliance for Poverty Alleviation*). Program SAPA meyakini bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah semata, akan tetapi juga harus melibatkan organisasi masyarakat yang ada.

3. Reorientasi Kebijakan/Regulasi

Reorientasi Kebijakan/Regulasi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Metro dapat di tuangkan

Reorientasi Kebijakan/Regulasi di kota metro dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Strategi penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial bersifat jangka panjang, terarah, serta fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, kebijakan ekonomi mikro dan makro guna meningkatkan akses penduduk miskin terhadap sumber daya produktif dan pasar.
- b. Strategi umum penanggulangan kemiskinan di Kota Metro merujuk pada Perpres No. 15 Tahun 2010 yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan peningkatan pelayanan dasar, meningkatkan kemampuan dan pendapat masyarakat miskin, dan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil (UMK).
- c. Melakukan pengkajian ulang untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan kebijakan yang menghambat sektor ekonomi lapisan penduduk miskin.
- d. Menggerakkan lembaga-lembaga sosial ekonomi pada berbagai jenjang dengan terus-menerus mendorong dan memberikan insentif untuk melayani kepentingan penduduk miskin lebih efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan dengan analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah Reorientasi Kebijakan/Regulasi dengan nilai tertinggi (8,66). Strategi ini berperan untuk menanggulangi kemiskinan yang

dalam bentuk gambar sebagai berikut:

ada pada Kota Metro, terutama Kecamatan Metro Utara dengan meninjau kembali kebijakan yang telah di tetapkan pemerintah Daerah Kota Metro apakah telah tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan yan terjadi di Kota Metro. Untuk menanggulangi kemiskinan pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengembangan dari beberapa sektor seperti pertanian, perdagangan, dan peternakan. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sudah pasti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidupnya dan dapat dipastikan dapat menanggulangi kemiskinan secara bertahap.

Adapun strategi penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro yaitu strategi penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial bersifat jangka panjang, terarah, serta fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, kebijakan ekonomi mikro dan makro. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan peningkatan pelayanan dasar, meningkatkan kemampuan dan pendapat masyarakat miskin. Melakukan pengkajian ulang untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan kebijakan yang menghambat sektor ekonomi lapisan penduduk miskin dan mendorong lembaga-lembaga sosial ekonomi dengan memberikan insentif untuk melayani kepentingan penduduk miskin lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Basri. 2015. Kemiskinan Dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Dan Prestasi Belajar Anak-Anak Di Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.8, h. 70-92.
- Idham, A. dan Pananrangi, A. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Plano Madani*, Vol. I, h. 29-38.
- Ikhsan dan Ulung pribadi . 2015. Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol.1, h. 92-144.
- Ilmi, Syaiful. 2017. Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *Al-Maslahah*, Vol. 13, h. 67-84.
- Kurniawan, Mohd. DP. 2017. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus di kecamatan Sungai Lilin). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol.8, h.16-20.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2017. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol. 2, h, 109-128.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 pada tatanan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah adalah pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
- Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Dan Kabupaten/Kota,
- Keputusan Walikota Metro Nomor : 127/Kpts/B-2/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro Tahun 2017 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Metro